Lantai Ruang Tamu Supadiyono Amblas

TEMANGGUNG (KR) - Keluarga Supadiyono (55) warga Dusun Karang Senen Rt 1 Rw 5 Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung dikejutkan dengan amblasnya lantai ruang tamu rumah yang ditempati. Supadiyono mengatakan sebelum lantai amblas terdengar suara sedikit bergemuruh dari dalam rumah serta suara seperti gerusan tanah oleh air. "Lantai berkeramik kemudian amlas, diiringi suara bergemuruh," kata Supadiyono, Kamis (18/2).

Dia mengatakan tidak ada korban jiwa dan luka pada kejadian yang berlangsung Selasa (16/2) sekitar pukul 19.30 tersebut. Keluarga kemudian keluar rumah dan melaporkan peristiwa yang terjadi pada perangkat desa dan pemerintah. Menghindari korban luka dan jiwa pada kejadian serupa yang kemungkinan terjadi di sisi lantai lain, keluarganya untuk sementara mengungsi di gereja setempat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan tanah amblas dengan diameter 2 meter dan tinggi 2,5 meter. Hasil pengecekan, kata dia, ternyata di bawah lantai terdapat irigasi. Aliran air tersebut berasal dari Desa Medari untuk mengalisi sawah di Desa Traji dan sekitarnya. "Air tidak dapat mengalir lancar, air meluap ke warga sekitar," katanya. Kerugian dari peristiwa itu, lanjut dia sekitar Rp 11 juta. Warga, TNI dari Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, BPBD dan relawan membersihkan sekitar tanah amblas, untuk kemudian dipasangi buis dan kembali ditutup. Dwi Sukarmei meminta warga meningkatkan kewaspadaan pada bencana. **(Osy)**

Budi Santoso Plh Bupati Sukoharjo

SUKOHARJO (KR) - Budi Santoso resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sukoharjo setelah pejabat sebelumnya Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya purna tugas. Penunjukan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengisi sementara dan menghindari kekosongan jabatan pemerintahan. Budi Santoso selain sebagai Plh Bupati Sukoharjo juga merangkap jabatan menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo. Budi Santoso, Kamis (18/2) mengatakan, benar dirinya ditunjuk langsung gubernur sebagai Plh Bupati Sukoharjo.

Penunjukan dilakukan setelah Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya purna tugas per 17 Februari kemarin. Untuk menghindari kekosongan jabatan dan melanjutkan roda pemerintahan sementara sambil menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penunjukan Plh Bupati Sukoharjo. Hal itu juga sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Plh Bupati Sukoharjo yang ditunjuk sekarang merupakan aparatur sipil negara (ASN) tunjukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Budi Santoso sebelumnya baru saja ditunjuk mengisi kekosongan jabatan Pj Sekda Sukoharjo. **(Mam)**

Bupati Banyumas Bantah Tolak SKB Tiga Menteri

KR-Driyanto

Bupati Banyumas Achmad Husein menunjukkan berita hoax di handphone.

BANYUMAS (KR) - Munculnya berita di salah satu media online terbitan Jakarta yang menyebutkan Bupati Banyumas Achmad Husein menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait dengan pakaian seragam dan atribut sekolah, langsung dibantah oleh Achmad Husein, Rabu (17/2). Menurut Achmad Husein berita itu berita hoax alias berita bohong yang sangat merugikan dirinya.

"Berita di media online ini menyebutkan bahwa mantan Wali Kota Padang, Pak Fauzi Bahar mengatakan ada kepala daerah yang menolak SKB 3 Menteri, termasuk di sini adalah Bupati Banyumas. Itu tidak benar, hoax itu," kata Achmad Husein di Pendapa Si Panji Purwokerto. Husein menjelaskan Banyumas selamanya patuh dan akan berpedoman pada peraturan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Terkait pemberitaan itu, Achmad Husein sangat kecewa dan akan segera melakukan protes secara resmi. "Saya kecewa, akan segera memrotes," ungkapnya.

Achmad Husein menegaskan yang disampaikan bukan menolak SKB 3 Menteri, tetapi saat ekonomi sedang susah, jangan mewajibkan pungutan apapun kepada orang tua terutama yang anaknya bersekolah di sekolah negeri.

"Termasuk juga seragam. *Wong* itu sekolah di rumah pembelajaran jarak jauh, kok pakai seragam, enggak usah pakai seragam. Nanti kalau sudah tatap muka, baru silakan wajib pakai seragam," jelasnya.

Bahkan, untuk orang-orang yang tidak mampu, pihaknya akan menanggung kebutuhan seragam sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Sebagaimana diberitakan media online itu disebutkan bahwa Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar menyerukan kepala daerah agar berani menolak SKB 3 Menteri terkait penerapan aturan berpakaian di sekolah karena SKB tersebut menghilangkan keberagaman kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Dalam berita tersebut, Fauzi mengapresiasi kepala daerah di antaranya Banyumas, Ciamis dan Pariaman yang menolak penerapan SKB 3 Menteri. **(Dri)**

CHIKUNGUNYA MEREBAK DI DUA KECAMATAN

Masyarakat Diminta Menggiatkan PSN

KARANGANYAR (KR) - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar mencatat 25 kasus Chikungunya dalam 1,5 bulan terakhir. Jumlah kasus tersebut tergolong tinggi.

"Baru awal tahun sudah banyak kasusnya. Masyarakat dalam memberantas sarang nyamuk perlu lebih serius. Data yang dihimpun, dua kecamatan masuk endemis," kata Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Karanganyar, Winarno, Kamis (18/2).

Data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Karanganyar memperlihatkan ada 25 kasus chikungunya yang muncul mulai dari awal tahun hingga saat ini. Kemunculan Chikunguya tersebut ada di Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu dan Lingkungan Temuireng, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar.

Winarno mengatakan ada pergeseran lokasi penyakit Chikungunya dibanding tahun lalu. Sebelumnya, penyakit Chikunguya banyak terjadi di Desa Suruh. Sementara kalau di Ka-ranganyar, berada di Tegalasri dan Badranasri.

Penyebab munculnya chikungunya hampir sama dengan DBD. Sehingga masyarakat diminta supaya lebih menggiatkan gerakan pe,berantasan sarang nyamuk (PSN). Meski belum ada kasus kematian akibat Chikungunya, namun perlu menjadi perhatian bersama.

Menurut Winarno, merebaknya penyakit Chikunguya saat ini tidak disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Karakternya mirip penyakit yang disebarkan nyamuk Aedes Aegypty yakni demam berdarah. Alasannya, telur nyamuk tidak terlalu lama berada di tempat penampungan air yang ada di luar rumah.

Tim Dinas Kesehatan Karanganyar sudah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) di dua wilayah tersebut. Hasilnya banyak ditemukan jentik nyamuk baik itu di dalam rumah maupun pekarangan seperti di bekas potongan bambu. Hasilnya memperlihatkan bahwa di dua lokasi anyar tersebut memiliki standar pelaksanaan PSN di bawah 60 persen. "Masih di bawah standar. Kalau PSN baik itu angka bebas jentik minimal 95 persen," Winarno.

Ditambahkan Winarno, efek yang ditimbulkan dari penyakit chikungunya adalah badan terasa lemas dan pegal-pegal. Sedangkan untuk dapat pulih kembali, penderita cukup istirahat. Efek yang ditimbulkan dari penyakit chikungunya cenderung tidak terlalu beresiko apabila dibandingkan dengan DBD. Kendati demikian, masyarakat tetap diimbau supaya lebih menggiatkan gerakan PSN. **(Lim)**

HUKUM

PANITIKISMO KRATON BUKAN PEJABAT TUN

Gugatan PTUN Tidak Dapat Diterima

YOGYA (KR) - Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara perizinan kenaikan status tanah oleh Pengugat Ir Made Suardana pada Tergugat I Badan Pertanahan Negara (BPN) Yogya dan Tergugat II Panitikismo Kraton Ngayogyakarta dalam pokok perkara, dinyatakan tidak tidak bisa diterima oleh Majelis Hakim PTUN Yogyakarta. Penggugat dinilai salah menarik Tergugat II karena bukan pejabat TUN

"Dalam Eksepsi menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut," tegas Majelis Hakim PTUN Yogyakarta yang di Ketuai Agustin Andriani SH dalam sidang putusan melalui ECourt, Rabu (17/2)

Eksepsi Tergugat II melalui kuasa hukum Dr Achiel Suyanto S SH MBA, Diana Eko Widiyastuti SE SH pada pokoknya menolak gugatan Penggugat. Objek gugatan Penggugat adalah surat yang dikeluarkan Tergugat I Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No 04934.1-Hp.02/I/-2020. Maka secara hukum gugatan keliru karena secara fakta Tergugat II dalam perkara a quo tidak mengeluarkan keputusan maupun penetapan dalam perkara a quo. Penggugat keliru menarik Panitikismo Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat sebagai Tergugat II.

"Kami mengapresiasi majelis hakim profesional cermat dan teliti dalam pemeriksaan perkara a quo. Semoga semua pihak juga dapat memahami dan menghormati putusan PTUN ini," ucap Diana.

Atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat, Widyo Seno SH dan Sugeng Pangastowo SH menyatakan siap mengajukan gugatan TUN lagi untuk mencari keadilan dengan tidak melibatkan Tergugat II. "Majelis hakim hanya mengabulkan eksepsi Tergugat II, tapi dalam pokok perkara, sudah kami sebutkan bescking atau tindakan atas kebijakan pejabat tata usaha negara yang berwujud surat keputusan No 049/34.1-Hp.02/I/-2020 dari Kantor Pertanahan Kota Yogya melibatkan juga Tergugat II yang bukan pejabat TUN," ujar Widyo. **(Hrd/R-4)**

DATANG DARI LUAR DAERAH

Lagi, Komplotan Pencuri Digulung

SLEMAN (KR) - Polsek Sleman kembali mengamankan kawanan pencuri spesialis tempat pusat perbelanjaan. Kali ini, lima pelaku digulung dengan barang bukti belasan potong celana panjang bermerek. Sama seperti komplotan sebelumnya, komplotan pelaku ini juga menggunakan korset.

Kapolsek Sleman Kompol Irwiantoro didampingi Kanit Reskrim Iptu Eko Haryanto, Kamis (18/2), mengungkap kelima pelaku adalah WK (26), MR (32), J (31), A (50) dan F (33). Tertangkapnya kawanan ini, diawali penangkapan terhadap salah satu pelaku yakni WK oleh petugas keamanan mal, Sabtu (13/2) pukul 16.30.

Dari keterangan WK, petugas melakukan pengejaran terhadap empat pelaku lainnya. "Dua orang tertangkap di wilayah Bantul, sedangkan dua lagi kami amankan saat berada di bus daerah Purworejo," jelasnya.

Saat dimintai keterangan, mereka mengaku datang dari Bandung Jawa Barat ke TKP, menumpang angkutan umum. Berbekal korset, mereka kemudian masuk ke dalam mall dan mengambil 11 potong celana panjang senilai Rp 7 juta.

Saat aksi mereka ketahuan, seorang berhasil diamankan sedangkan empat pelaku melarikan diri. Dalam aksinya, tiga orang melakukan eksekusi, sedangkan dua lainnya menjadi pengawas. "Satu pelaku mengambil tiga hingga empat potong celana kemudian dimasukkan ke dalam korset. Mereka mengaku mendapatkan ide mencuri dengan memakai korset dari YouTube. Saat ini kelimanya sudah kami tahanan dengan barang bukti 11 potong celana jeans dan tiga buah korset," pungkas Kapolsek. **(Ayu)**

KR-Wahyu Priyanti

Tersangka menunjukkan celana yang mereka curi.

HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

BNNP Jateng Sita Aset Tanah dan Bangunan

PURWOKERTO (KR) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Kamis (18/2), menyita aset tanah dan bangunan serta puluhan burung senilai Rp 605.500.000 yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang atasnama Budiman (43) warga binaan Lapas Kelas II A Purwokerto.

Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol Dr Benny Gunawan, saat melakukan penyitaan aset tanah, bangunan serta puluhan burung berharga mahal di Desa Kutasari Baturraden Banyumas, menjelaskan Budiman yang menjadi warga binaan Lapas Purwokerto berperan sebagai bandar narkoba yang mengatur peredaran dari Lapas Purwokerto.

"Sejak tahun 2016 sewaktu masih di penjara, Budiman tetap menjalankan bisnis narkotika dengan cara menerima setoran pembayaran dari pembeli melalui rekening istri dan adiknya. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika dan sebagian lagi keuntungan dibelikan aset tanah dan rumah bangunan bertingkat selanjutnya disita penyidik BNNP Jawa Tengah," ungkap Benny.

Kasus tersebut terungkap setelah tim gabungan Lapas Kelas II A Purwokerto bekerjasama BNNK Banyumas, BNNP Jawa Tengah dan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang narkotika.

Dari uang hasil kejahatan tersebut oleh tersangka Budiman dibelikan sebidang tanah seluas 85.4 M2 dan untuk membangun sebuah rumah 2 lantai di Desa Kutasari Baturraden seharga Rp 500 juta. Kemudian 22 burung berkicau jenis murai batu, jalak, kolibri dan cabecabeaan senilai Rp 100 juta.

Selain aset tanah bangunan dan burung juga disita uang tunai Rp 6,5 juta. Sementara itu, petugas Satresnarkoba Polres Karanganyar menangkap tiga pelaku penyalahgunaan narkotika di Desa Kemiri Kebakkramat. Mereka berinisial RI (21) dan W alias I (57) yang merupakan warga Desa Kemiri, Kebakkramat. Sementara seorang lagi berinisial JN (36) asal Kecamatan Masaran Sragen.

"Barang bukti yang diamankan satresnarkoba berupa 2 bungkus sabusabu masing-masing seberat 0,06 dan 0,08 gram. Kemudian juga diamankan tiga unit HP milik pelaku," jelas Kasubbag Humas Polres Karanganyar, Iptu Agung Purwoko, Rabu (17/2).

Penangkapan terhadap tiga pelaku berawal dari informasi adanya pesta sabu-sabu di Kebakkramat. Sebelumnya, petugas mengintai aktivitas tersebut. Setelah memastikan semuanya bisa terkendali, lalu pesta narkoba itu digerebek pada pukul 05.30 WIB. **(Dri/Lim)**

KR-Driyanto

Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Benny Gunawan memimpin penyitaan tanah dan bangunan milik Budiman.

PERKARA DUGAAN KORUPSI DI DLH

Tiga Terdakwa Mulai Diadili

PURBALINGGA (KR) - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai menjalani sidang, Rabu (17/2). Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dilakukan secara daring.

Jaksa dan hakim hadir di Pengadilan Tipikor di Semarang. Sedangkan, ketiga terdakwa menjalani sidang di Rutan Kelas IIB Purbalingga.

"Sidang ketiga terdakwa disatukan untuk menghemat waktu persidangan di tengah pandemi Covid-19," tutur Kasi Pidsus Kejari Purbalingga, Tandyo Sugondo.

Surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadli Surahman. Ketiga terdakwa secara bergantian mendengarkan dakwaan dari JPU melalui layar komputer yang dipasang di Rutan. Ketiga terdakwa mengenakan kemeja putih dan celana hitam serta mengenakan peci hitam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Purbalingga menetapkan CK mantan Kasi Pengelolaan Sampah DLH Purbalingga tahun anggaran 2017-2018, sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai tersangka kasus penggelapan uang iuran sampah dan belanja BBM kendaraan pengangkut sampah.

Selain CK, jaksa juga menjerat M bendahara sekaligus staf PPTK dan SK pegawai sebuah SPBU yang menjadi rekanan pihak ketiga dari DLH dalam kasus tersebut. Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purbalingga tahun 2017-2018 ini diperkirakan mencapai Rp 870 juta. **(Rus)**